

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan di beberapa negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah lama menjadi persoalan dan sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang ataupun kelompok mengalami kekurangan atau ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan hal-hal pemenuhan kualitas hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan Pendidikan.

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk tersebut adalah: 1) tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri; 3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4) banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas; 5) diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lajunya pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan masih banyak lagi. Lajunya pertumbuhan penduduk, membuat kemiskinan menjadi meningkat karena jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban. Kemudian kemiskinan selalu dikaitka dengan rendahnya tingkat pendidikan karena ketidakmampuan seseorang dalam mencapai pendidikan yang tinggi sehingga menyebabkannya kurang

Akan pengetahuan ataupun kurangnya skill dalam bekerja. Masalah rendahnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan timbulnya pengangguran.

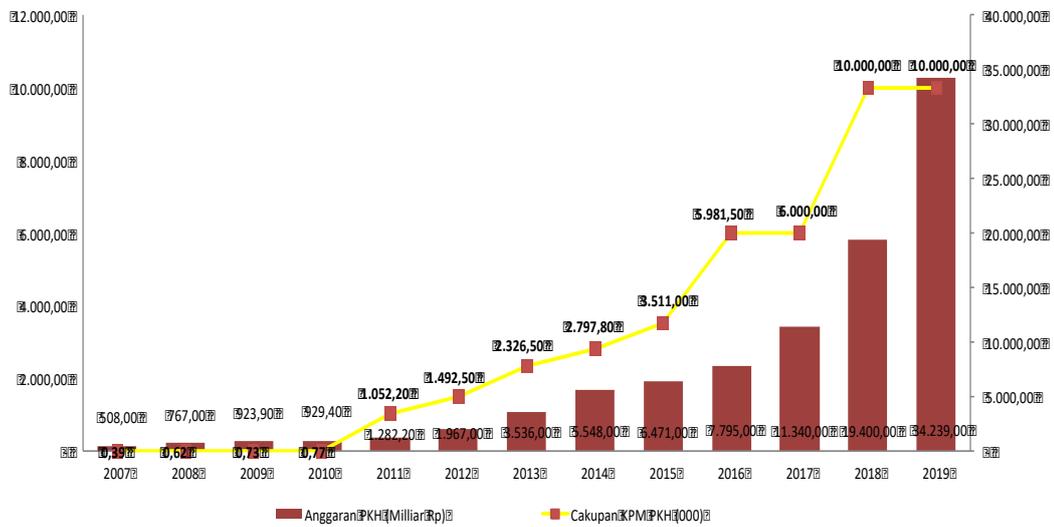
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, kemiskinan ditandai dengan munculnya masyarakat miskin lemah yang tidak memiliki kemampuan dalam berusaha serta mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa program sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang rumit, terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan harus ditangani dengan serius karena menyangkut hak hidup seseorang. Dalam penurunan kemiskinan pemerintah harus tetap hadir dalam peranannya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tentang kemiskinan, sejatinya peranan pemerintah hadir dalam bentuk proteksi untuk melindungi beragam potensi ekonomi lokal dan nasional.

Salah satu Program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan system perlindungan sosial di Indonesia. Sasaran PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sesuai kriteria PKH yakni: memiliki ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah tingkat SD-SMP. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang rencana tindak percepatan pencapaian sasaran Program Pro-Rakyat, dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Merujuk pada

sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tersebut, PKH menjadi model jaminan yang unik.

Di satu sisi, PKH merupakan bantuan sosial yang di maksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam kebutuhan dasar terutama Pendidikan dan Kesehatan. Di sisi lain, PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui promosi Kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui rekening khusus penerima PKH, agar penerima dapat mengakses fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga sekolah menengah pertama, anak balita harus mendapatkan imunisasi dan ibu hamil harus memeriksa kandungan secara rutin.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan pemerintah di Indonesia pada bulan maret tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi (Sumatra barat, DKI Jakarta, jawa barat, jawa timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Pertama kali diluncurkan, PKH mencakup ketujuh provinsi yang disebutkan di atas yang didasarkan atas sejumlah kriteria yakni kondisi kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah, dan kesiapan dalam pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.



Sumber: kementerian sosial

Gambar 1.2 Cakupan PKH Tahun 2007-2019

Sejak tahun 2007 Program Keluarga Harapan di keluarkan, penganggaran dan cakupan KPM PKH untuk program ini setiap tahun mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019. Hal ini dapat kita liha pada data yang dipublikasikan oleh kementerian sosial diatas. Dimana pada tahun 2007 anggaran untuk PKH hanya sebesar 508 Milliar dengan cakupan KPM PKH 0,39. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5.548 Milliar yang di ikuti oleh cakupan KPM PKH sebesar 2.797,80. Dan pada tahun 2019 jumlah anggaran yaitu sebesar 34.239 Milliar dan cakupan KPM PKH sebesar 10.000. Akan tetapi cakupan KPM PKH pada tahun 2018 dan 2019 sama besarnya, dan anggaran yang di keluarkan berbeda. Hal ini di karenakan jumlah bantuan di tambah.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2006-2007

Provinsi	Jumlah penduduk miskin menurut provinsi	
	2006	2007
Aceh	28,28	26,65
sumatera utara	15,01	13,90
Sumatera barat	12,51	11,90
Riau	11,85	11,20
Jambi	11,37	10,27
Sumatera selatan	20,99	19,15
Bengkulu	23	22,13
Lampung	22,77	22,19
Kep. Bangka belitung	10,91	9,54
Kep. Riau	12,16	10,30
Dki Jakarta	4,57	4,61
Jawa barat	14,49	13,55
Jawa tengah	22,19	20,43
Di yogyakarta	19,15	18,99
Jawa timur	21,09	19,98
Banten	9,79	9,07
Bali	7,08	6,63
Nusatenggara barat	27,17	24,99
Nusa tenggara timur	29,34	27,51
Kalimantan barat	15,24	12,91
Kalimantan tengah	11	9,38
Kalimantan selatan	8,32	7,01
Kalimantan timur	11,41	11,04
Kalimantan utara	-	-
Sulawesi utara	11,54	11,42
Sulawesi tengah	23,63	22,42
Sulawesi selatan	14,57	14,11
Sulawesi tenggara	23,37	21,33
Gorontalo	29,13	27,35
Sulawesi barat	20,74	19,03
Maluku	33,03	31,14
Maluku utara	12,73	11,97
Papua barat	41,34	39,31
Papua	41,52	40,78
Indonesia	17,75	16,58

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas, terlihat bahwa jumlah kemiskinan Indonesia pada tahun 2006 yaitu 17,75% dan pada tahun 2007 jumlah kemiskinan di

Indonesia turun menjadi 16,58%. Turunnya angka kemiskinan pada tahun 2007 ini, dikarenakan awalnya Program Keluarga Harapan di keluarkan yaitu pada tahun 2007. Sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini jumlah kemiskinan di Indonesia dapat di tekan. Sehingga jika program masih akan terus berjalan, kemungkinan besar dapat menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya.

Permasalahan strategis pada pemerintahan yakni masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan negara lain. Kemiskinan pula merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Upaya pengentasan masyarakat miskin pada saat ini menjadi jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Walaupun Program Keluarga Harapan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan akan tetapi program ini masih belum maksimal karena tingkat kemiskinan di Indonesiamasih tinggi.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019

Provinsi	Jumlah penduduk miskin menurut provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01
Sumatera utara	10,79	10,27	9,28	8,94	8,63
Sumatera barat	6,71	7,14	6,75	6,55	6,29
Riau	8,82	7,67	7,41	7,21	6,90
Jambi	9,12	8,37	7,90	7,85	7,51
Sumatera selatan	13,77	13,39	13,10	12,82	12,56
Bengkulu	17,16	17,03	15,59	15,41	14,91
Lampung	13,53	13,86	13,04	13,01	12,30
Kep. Bangka belitung	4,83	5,04	5,30	4,77	4,50
Kep. Riau	5,78	5,84	6,13	5,83	5,80
Dki Jakarta	3,61	3,75	3,78	3,55	3,42
Jawa barat	9,57	8,77	7,83	7,25	6,82
Jawa tengah	13,32	13,19	12,23	11,19	10,58
Di Yogyakarta	13,16	13,10	12,36	11,81	11,44
Jawa timur	12,28	11,85	11,20	10,85	10,20
Banten	5,75	5,36	5,59	5,25	4,94
Bali	5,25	4,15	4,14	3,91	3,61
Nusa tenggara barat	16,54	16,02	15,05	14,63	13,88
Nusa tenggara timur	22,58	22,01	21,38	21,03	20,62
Kalimantan barat	8,44	8,00	7,86	7,37	7,28
Kalimantan tengah	5,91	5,36	5,26	5,10	4,81
Kalimantan selatan	4,72	4,52	4,70	4,65	4,47
Kalimantan timur	6,10	6,00	6,08	6,06	5,91
Kalimantan utara	6,32	6,99	6,96	6,86	6,49
Sulawesi utara	8,98	8,20	7,90	7,59	7,51
Sulawesi tengah	14,07	14,09	14,22	13,69	13,18
Sulawesi selatan	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56
Sulawesi tenggara	13,74	12,77	11,97	11,32	11,04
Gorontalo	18,16	17,63	17,14	15,83	15,31
Sulawesi barat	11,90	11,19	11,18	11,22	10,95
Maluku	19,36	19,26	18,29	17,85	17,65
Maluku utara	6,22	6,41	6,44	6,62	6,91
Papua barat	25,73	24,88	23,12	22,66	21,51
Papua	28,40	28,40	27,76	27,43	26,55
Indonesia	11,22	10,86	10,12	9,66	9,22

sumber data : Badan Pusat Statistik

Walaupun kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, akan tetapi setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Dimana berdasarkan data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik terlihat bahwa, persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 11,22% pada tahun 2017 turun sebesar 1,1% menjadi 10,12%. Dan pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 9,22% atau hanya turun sebesar 0,44% dari tahun 2018.

Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia jika di bandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin pada masa sebelum adanya Program Keluarga Harapan, terlihat bahwa persentase kemiskinan di Indonesia dari tahun 2006-2019 terus tertekan atau dengan kata lain terus mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2006 terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17,75% sedangkan pada tahun 2007-2019 dimana Program Keluarga Harapan sudah berjalan, angka persentase kemiskinan dari 16,58% - 9,22%. Hal ini menandakan bahwa, selama Program Keluarga Harapan berjalan, angka persentase kemiskinan Indonesia dari tahun 2006-2019 turun sebesar 8,53%.

Pemberian Program Keluarga Harapan ini telah berjalan dengan baik dan maksimal pada beberapa tahun terakhir, namun di tahun 2020 ini PKH masih belum efektif pada awal tahun hal tersebut dikarenakan adanya wabah covid 19 ini yang menghambat berjalannya aktivitas-aktivitas instansi sehingga penyaluran program tersebut masih mengalami hambatan, namun dengan berjalannya waktu program ini telah di percepat oleh pemerintah dengan harapan agar kategori PKH ini yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dan untuk meminimalisir angka kemiskinan ke

masa yang akan datang dengan harapan masyarakat akan mendapatkan haknya untuk menerima PKH ini dan dengan adanya program tersebut kondisi ekonomi masyarakat miskin masih dapat terminimalisir dengan mengingat keadaan ekonomi sekarang di tengah-tengah adanya wabah ini yang telah mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun.

Keterkaitan antara Program Keluarga Harapan dengan kemiskinan yaitu dengan adanya program tersebut maka dapat menyadarkan masyarakat miskin akan pentingnya kesehatan dan pendidikan, karena sebagian besar masyarakat yang anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk menempuhi pendidikan, mendapatkan kesehatan bagi ibu hamil dan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak Program PKH terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap kemiskinan di Indonesia?

3. Bagaimana dampak jumlah bantuan PKH terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana dampak jumlah SDM (Tenaga Pendamping PKH) terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dampak dari Program PKH terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak jumlah bantuan PKH terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui jumlah SDM (Tenaga Pendamping PKH) terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan teori atau ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menanggulangi kemiskinan.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait dengan pengentasan kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia.